

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, pemerintah daerah diartikan sebagai sebuah organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan suatu daerah dengan berdasarkan prinsip otonomi. Menurut UU No. 32 Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri segala urusan pemerintahan sesuai perundangan-undangan (Indrayani & Khairunnisa, 2019). Sehingga dengan dijalankan otonomi daerah, diharapkan pemerintahan mampu berjalan secara efektif dan efisien (Saragih & Siregar, 2021)

Dalam implementasinya, kebijakan yang di terapkan dalam pemerintah daerah memiliki satu tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat (Maulina & Rhea, 2019). Suatu daerah bisa dikatakan maju dan berkembang apabila sudah mampu menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas yang dicapai tinggi, serta mampu menerapkan value for money dengan benar. Sebagai wujud pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, infrastruktur, serta penyediaan fasilitas publik.

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berfokus pada sektor - sektor strategis dan potensial baik sektor riil, finansial, serta infrastruktur. Peran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan juga menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pada pemerintah daerah juga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan itu digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat yang digunakan sebagai pengendalian dan evaluasi kinerja secara keseluruhan maupun pada unit-unit kerja di dalam pemerintah daerah. Fungsi utamanya yaitu untuk memberikan informasi keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana laporan keuangan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan baik untuk ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu laporan keuangan yang handal serta dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah yang baik.

Laporan keuangan juga bisa dijadikan dasar pengukuran kinerja pada suatu entitas. Kinerja sendiri bisa diartikan sebagai pencapaian atas apa yang sudah direncanakan baik itu oleh pribadi maupun organisasi. Menurut kamus akuntansi, kinerja bisa diartikan sebagai aktivitas yang terukur dari suatu entitas selama periode tertentu yang merupakan bagian dari ukuran keberhasilan suatu pekerjaan. Kinerja dapat dikatakan bagus apabila pencapaian yang didapat melebihi dari pada yang direncanakan. Sedangkan, jika pencapaiannya tidak sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja bisa dikatakan jelek.

Untuk mengetahui kinerja keuangan di suatu entitas baik atau buruk maka dilakukan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja bisa diartikan sebagai tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap suatu pekerjaan baik pada sistem keuangan maupun non keuangan (Susanto, 2019). Tujuan pengukuran kinerja keuangan ini salah satunya untuk dijadikan tolak ukur guna mencapai peningkatan kinerja khususnya pada keuangan pemerintah daerah di periode berikutnya.

Menurut Susanti, cara yang bisa digunakan dalam mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah (Saragih & Siregar, 2021). Beberapa rasio yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Analisis rasio keuangan tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu alat ukur dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Purworejo serta menjadi pedoman untuk menyusun dan menetapkan APBD di masa mendatang.

Purworejo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, tepatnya terletak di bagian Selatan Pulau Jawa. Kabupaten Purworejo memiliki sumber daya alam (SDA) seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, dan pariwisata. Sebagai salah satu kabupaten dengan penduduk yang lumayan banyak, adanya otonomi daerah diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan dan percepatan pembangunan yang bertumpu pada potensi daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini gambaran mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 – 2022 :

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018 – 2022

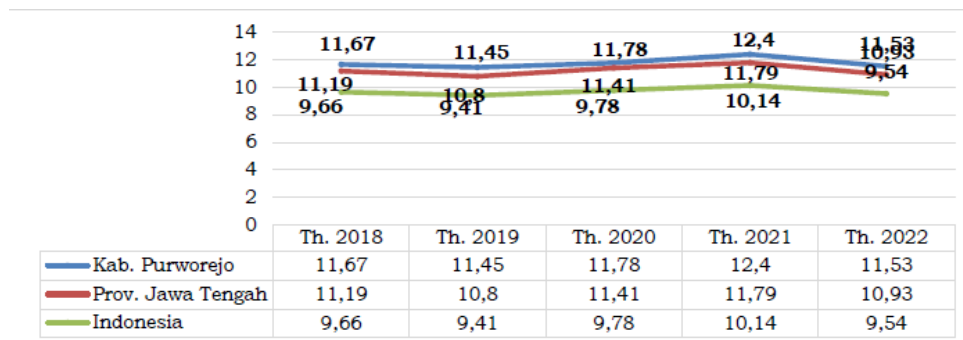
Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2018	Rp 286.970.000.000,00
2019	Rp 280.396.155.599,00
2020	Rp 304.785.976.609,00
2021	Rp 438.264.776.270,00
2022	Rp 330.274.511.807,00

Sumber: *djpk Kemenkeu RI*

Data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan di setiap tahunnya walaupun pada tahun 2019 dan 2022 mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 286.970.000.000,00. Di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 6.573.844.401,00 menjadi Rp 280.396.155.599,00. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.389.821.010,00. Tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 133.478.799.661,00. Untuk tahun 2022 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp 107.990.264.463,00.

Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya melakukan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tujuan untuk membangun daerahnya dalam rangka peningkatan kinerja keuangan daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja keuangan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa daerah itu sudah mampu melakukan desentralisasi fiskal serta sudah tidak terlalu bergantung pada Pemerintah Pusat.

Kinerja keuangan yang baik juga di lihat dari bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam menangani Kemiskinan. Menurut data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo memiliki garis kemiskinan yang lumayan tinggi namun bukan termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Grafik perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 5 tahun dari 2018-2022 dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 10. Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2018 – 2022

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2022 & BPS Provinsi Jawa Tengah 2022

Secara umum, dapat dikatakan tingkat kemiskinan di Purworejo dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dari kondisi pada tingkat provinsi. Jika di kaitkan dengan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih berada di atas target nasional yaitu menurun menjadi 7-8%. Masih besarnya gap tingkat kemiskinan dan kurangnya penanganan terhadap hal ini dapat menyebabkan kinerja suatu daerah menjadi buruk jika tidak ditangani dengan baik.

Penelitian ini bukan yang pertama dan satu-satunya, ada beberapa penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya yaitu oleh Joko Pramono (2014) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)”. Selain itu, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Livia Margarita (2019) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018”.

Dalam penelitian terdahulu, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan guna menilai kinerja keuangan seperti rasio derajat desentralisasi, rasio Debt Servis Coverage Ratio (DSCR), rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, dan rasio keserasian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek atau daerah yang diteliti, tahun penelitian, serta rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis rasio berupa analisis kinerja pada laporan keuangan daerah dengan menggunakan beberapa rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo apabila ditinjau dari Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo apabila ditinjau dari Rasio Efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo apabila ditinjau dari Rasio Kekeragaman?
4. Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo apabila ditinjau dari Rasio Pertumbuhan?
5. Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo apabila ditinjau dari Rasio Kemandirian?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang ada, maka perlu pembatasan masalah untuk menghindari berbagai macam kesalahan persepsi yang terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada “Analisis Kinerja Keuangan Daerah yang dilihat melalui Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kekeragaman, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian di BPPKAD Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 - 2022”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo jika dilihat dari rasio efektivitas?
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah?
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo jika dilihat dari rasio keserasian?
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo jika dilihat dari rasio pertumbuhan?
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah?

1.1 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan pengujian dan mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo dilihat dari Laporan Keuangan menggunakan Rasio Keuangan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo ditinjau dari Laporan Keuangan menggunakan Rasio Keuangan. Gambaran terkait Kinerja Keuangan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk membuat keputusan, memperbaiki kinerja, dan mengalokasikan sumber daya

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Pendapatan Daerah. Sebagai media belajar untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana menganalisis suatu laporan keuangan menggunakan berbagai rasio keuangan untuk menilai baik atau buruknya suatu kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk perbandingan dalam melakukan penelitian dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.